

Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupate/Kota Provinsi Jawa Barat

Attifah Meita Rahmah¹, Indri Arrafi Juliannisa²

^{1,2,3} UPN Veteran Jakarta

Email: am.rahmah@upnvj.ac.id¹, indri.arrafi@upnvj.ac.id²

ABSTRAK

Provinsi Jawa Barat menjadi sentra ekonomi yang memiliki banyak jumlah penduduk usia produktif di Indonesia yang akan menghadapi masa bonus demografi. Tingginya tingkat pengangguran di daerah tersebut menjadi permasalahan ketenagakerjaan yang mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja belum optimal dengan beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat pendidikan, upah minimum, dan PDRB secara parsial dan simultan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data panel dengan data yang digunakan adalah 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang termasuk kedalam daerah dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi dalam kurun waktu tahun 2015 – 2020. Penelitian ini dapat menunjukkan yaitu tingkat pendidikan dan upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, namun PDRB tidak berpengaruh.

Kata Kunci: Penyerapan Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, PDRB

ABSTRACT

West Java Province is an economic center with many productive age populations in Indonesia that will face a period of demographic bonus. The high level of unemployment in the area is an employment problem that indicates that labor absorption is not yet optimal with several factors that can influence it. This study aims to determine the effect of the variable level of education, minimum wage, and GRDP partially and simultaneously on the absorption of labor in the Regency/City of West Java Province. This study uses panel data with the data used are 6 regencies/cities in West Java Province which are included in the regions with the highest employment absorption in the period 2015-2020. This study can show that the level of education and the minimum wage has an effect on employment in the Regency/City of West Java Province, but GRDP has no effect.

Keywords: Labor Absorption, Education Level, Minimum Wage, GRDP

PENDAHULUAN

Modal Menurut Adam Smith pengalokasian sumber daya manusia secara efektif memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi, di mana kekayaan suatu negara dapat ditentukan oleh proporsi dan produktivitas tenaga kerja sehingga perlu adanya upaya pemanfaatan SDM itu sendiri (Mukherjee, 2002). Menurut Keynes dalam teori upah efisiensi mengemukakan bahwa para pekerja akan lebih produktif jika terdapat peningkatan upah yang tinggi, hal tersebut juga akan berdampak pada meningkatnya produktivitas perusahaan (Lokanathan, 2018). Provinsi Jawa Barat menjadi sentra ekonomi serta memiliki penduduk usia kerja terbesar di Indonesia (Ibrahim, 2020), disisi lain juga merupakan daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia, di mana tingginya pengangguran terjadi akibat lapangan kerja yang tersedia tidak mampu menyerap banyaknya angkatan kerja (Pratiwi, Marseto, & Sishadiyati, 2021).

Berdasarkan data penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa keadaan penyerapan tenaga kerja di setiap daerah berdesa satu sama lain, di mana terdapat enam daerah yang memiliki kondisi penyerapan tenaga kerja tertinggi antara lain Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kabupaten Garut. Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi, hal ini karena adanya peran investor asing dan dalam negeri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, selain itu juga memiliki penduduk usia kerja dengan jumlah yang besar. Adapun kondisi tersebut berbeda dengan Kabupaten Garut yang menjadi daerah terendah di antara lima daerah lainnya, hal ini karena penduduk usia kerja nya yang tidak sebanyak ke lima daerah lainnya dan pekerja di Kabupaten Garut didominasi oleh sektor pertanian yang siklusnya lebih lambat dan efek *multiplier* nya lebih rendah dibandingkan dengan daerah unggulan pada sektor industri (BAPPEDA Garut, 2020).

Kualitas angkatan kerja dapat terlihat berdasarkan tingkat pendidikannya, dengan adanya proses pendidikan maka *skill* manusia dapat meningkat hal ini didasari oleh teori *human capital* oleh Becker (Yulistiyono, et al., 2021). Tingkat pendidikan di Kabupaten Bogor pada tahun 2020 mengalami peningkatan akan

tetapi kondisi penyerapan tenaga kerja nya menurun, hal ini karena adanya kondisi penyebaran virus *Covid-19* yang mempengaruhi banyak perusahaan dan industri sehingga berdampak juga pada penyerapan tenaga kerja (Komisi IX DPR RI, 2020). Kabupaten Garut pada tahun 2019 mengalami penurunan tingkat pendidikan namun kondisi penyerapan tenaga kerja nya meningkat, hal ini karena investor yang terus bertambah dan adanya kehadiran PT. Changsin Reksa Jaya (Abidin, 2019). Penjelasan di atas menunjukkan adanya *gap* yaitu ketidaksesuaian yaitu dengan meningkatnya tingkat pendidikan seharusnya dapat bersamaan dengan penyerapan tenaga kerja yang meningkat pula.

Peningkatan upah juga mampu mendorong para pekerja untuk lebih produktif, selain itu juga dapat mendorong daya beli masyarakat sehingga produktivitas perusahaan akan meningkat di mana para pengusaha akan menambah permintaan tenaga kerja nya (Iksan, Arifin, & WahyudiSuliswanto, 2020). Kota Bekasi merupakan daerah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Bogor akan tetapi penyerapan tenaga kerja Kota Bekasi lebih rendah, hal ini karena beberapa perusahaan garmen yang akhirnya merelokasi usaha nya ke luar daerah Kota Bekasi dengan faktor penyebabnya yaitu UMK yang terlalu tinggi (Buana, 2018). Penjelasan tersebut menunjukkan adanya *gap* yaitu seharusnya upah minimum yang tinggi dapat bersamaan dengan tingginya penyerapan tenaga kerja di suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan PDRB dapat menunjukkan adanya peningkatan *output* yang dihasilkan dan dijual oleh perusahaan sehingga untuk dapat meningkatkan produksi guna memenuhi permintaan yang meningkat maka permintaan tenaga kerja oleh perusahaan pun akan meningkat (Ferianto, 2014) dalam (Ganie, 2017).

Berdasarkan data BPS terjadinya peningkatan PDRB Kabupaten Bandung pada tahun 2018 bersamaan dengan menurunnya penyerapan tenaga kerja, hal ini karena Industri Kecil Menengah (IKM) Sarung Majalaya gulung tikar sehingga perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja (Handriansyah, 2018). Pada tahun yang sama PDRB Kota Bandung

pun mengalami peningkatan namun penyerapan tenaga kerjanya menurun, hal ini karena pertumbuhan ekonomi yang melambat di beberapa lapangan usaha sehingga berdampak pada menurunnya tenaga kerja yang terserap pada sektor yang memiliki peranan besar (BPS Kota Bandung, 2019). Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan adanya *gap* bahwa PDRB yang meningkat tidak selalu bersamaan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas maka perlu adanya gagasan ataupun rekomendasi yang dapat membantu, sehingga menjadi alasan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum, dan PDRB baik secara parsial maupun simultan terhadap penyerapan tenaga kerja.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Ketenagakerjaan oleh Keynes

Menurut Keynes menurunnya upah kemungkinannya kecil dapat terjadi karena akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat sehingga konsumsi secara keseluruhan akan berkurang sebagai akibat dari harga-harga yang menurun, kondisi ini dapat menurunkan kurva nilai marginal produktivitas tenaga kerja di mana menjadi tolak ukur banyak perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerjanya sehingga dapat menyebabkan berkurangnya tenaga kerja, para pekerja yang tergabung dalam serikat kerja akan terus berusaha memperjuangkan kepentingan agar tingkat upah tidak menurun (Purwanti, Wijaya, Meigawati, & Kusuma, 2021). Pada teori upah efisiensi menjelaskan bahwa turnover pekerja dapat berkurang apabila upah yang diberikan tinggi sehingga insentif pekerja semakin besar untuk tetap bekerja di perusahaan itu sendiri, selain itu dengan upah yang dibayar tinggi maka dapat mendorong usaha kerja keras para pekerja sehingga akan mempengaruhi produktivitas yang meningkat (Ariyanto, 2018).

Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut (Simanjuntak, 2001) dalam (Marliani, 2018) sejumlah tenaga kerja yang digunakan oleh suatu unit usaha tertentu disebut sebagai penyerapan tenaga kerja. Dari seluruh pekerja yang dapat terserap dan tersebar pada berbagai sektor serta mampu membuat suatu barang atau jasa yang relative besar dapat disebut pula penyerapan tenaga kerja. Adapun

menurut (Todaro, 2011) dalam (Anton & Huda, 2019) penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang diterima untuk mengerjakan tugas nya dan menggambarkan bahwa lapangan kerja tersedia untuk kemudian akan diisi oleh para pencari pekerjaan. (Yulistiyono, et al., 2021).

Upah Minimum

Dalam teori efisiensi menyebutkan bahwa tingginya upah yang diberikan maka dapat berdampak pada tenaga kerja yang menjadi lebih produktif, selain itu skill pekerja akan bergantung dari seberapa besar perusahaan membayar upah kepada para pekerjanya (Mankiw, 2006) dalam (Angga & Fitriah, 2020). Prinsip dari adanya kebijakan upah minimum yaitu untuk mengupayakan agar para tenaga kerja/buruh mendapatkan penghasilan yang layak melalui pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga kerja tersebut namun tidak mengabaikan baik produktivitas serta kemajuan dari perusahaan itu sendiri dan perkembangan ekonomi seperti pada umumnya (Khakim Abdul, 2006) dalam (Lumanaw, Rumokoy, & Tampanguma, 2021). Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 90 ayat 1 menyebutkan bahwa: “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dapat dihasilkan dari keseluruhan unit usaha atau nilai akhir dari barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh semua unit ekonomi di suatu daerah tertentu. Adapun Hukum Okun (Okun's Law) yang dijelaskan oleh (Mankiw, 2006) dalam (Meilasari, 2020) menyebutkan bahwa penurunan satu persen pengangguran berhubungan dengan GDP Rill yang bertambah mendekati dua persen hal tersebut menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara GDP Rill dengan pengangguran, adapun indikator yang mempengaruhi GDP adalah PDRB, di mana pengaruhnya positif terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga jika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja juga meningkat, dan begitupun sebaliknya. Menurut (Feriyanto, 2014) dalam (Ali, Kolengan, & Siwu, 2020) menjelaskan bahwa apabila output atau penjualan perusahaan meningkat maka permintaan tenaga kerja oleh perusahaan akan meningkat, hal itu karena untuk memenuhi permintaan akibat adanya produksi dan

penjualan yang mengalami peningkatan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- Y : Penyerapan Tenaga Kerja
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien garis regresi
- X_1 : Tingkat Pendidikan
- X_1 : Upah Minimum
- X_1 : PDRB
- i : Daerah
- t : Waktu
- ε : error

Hipotesis Penelitian

H₁: Diduga Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

H₂: Diduga Upah Minimum berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

H₃: Diduga PDRB berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

METODOLOGI

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari penyerapan tenaga kerja(Y), tingkat pendidikan(X₁), upah minimum (X₂), dan PDRB(X₃) pada Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, dan Kota Bekasi. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 sampel yang didapat dari banyak nya daerah yaitu enam kabupaten/kota dikali dengan periode tahun 2015-2020 yaitu sebanyak enam tahun. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder dan teknik yang digunakan yaitu *non probability sampling*. Selain itu penelitian menggunakan teknik analisis regresi data panel (*pooled data*). Analisis dalam penelitian ini terdiri atas Uji asumsi klasik, Uji t, Uji F, dan Uji *r-squared* dan *adjusted. r-squared*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menemukan apakah data dapat terdistribusi normal, di mana dapat ditunjukkan melalui koefisien dari nilai Jarque-bera dan probabilitasnya. Adapun ketentuannya adalah jika nilai probabilitas J-B melebihi nilai signifikan $\alpha(0.05)$ maka menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal, begitupun sebaliknya (Gujarati & Porter, 2015).

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Jarque-Bera	4.246478
Probability	0.119643

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2022.

Berdasarkan hasil olah data yang tertera pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai hitung probabilitas Jarque-Bera adalah $0.119643 > 0.05$, sehingga kesimpulannya adalah data *residual* terdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Uji ini dilakukan untuk dapat mengindikasikan adanya korelasi antarvariabel *independent* pada model regresi. Adapun untuk dapat memprediksinya dapat terlihat jika korelasi antarvariabel *independent* cukup besar yaitu 0.89 maka kesimpulannya adalah terdapat masalah multikolinieritas (Ghozali & Ratmono, 2017).

Tabel 2. Hasil Uji Multikolonieritas

	Tingkat Pendidikan	Upah Minimum	PDRB
Tingkat Pendidikan	1.000000	0.765395	0.289452
Upah Minimum	0.765395	1.000000	0.560669
PDRB	0.289452	0.560669	1.000000

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2022.

Berdasarkan hasil uji yang tertera pada tabel di atas terlihat bahwa korelasi setiap variabel *independent* < 0.89 , maka kesimpulannya yaitu model regresi tidak terdapat masalah multikolonieritas.

Uji Heterokedastisitas

Uji ini dilakukan untuk melakukan pengujian apakah terdapat ketidaksamaan varians residual pada satu observasi dengan observasi lainnya. Salah satu metode untuk mengetahui masalah tersebut dapat dilakukan melalui Uji Glejser untuk meregresikan nilai absolut residual, dengan ketentuan yaitu tolak H₀ apabila *p-value* per variabel < 0.05 maka kesimpulannya adalah terdapat masalah heterokedastisitas (Ghozali & Ratmono, 2017).

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Probabilitas
Tingkat Pendidikan	0.7737
Upah Minimum	0.2000
PDRB	0.0517

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2022.

Ketentuannya adalah tolak H₀ apabila nilai *p-value* masing-masing variabel < 0.05 , maka kesimpulannya adalah terdapat gejala

heterokedastisitas. Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas didapatkan bahwa nilai *p-value* setiap variabel > 0.05 maka terima H_0 , sehingga kesimpulannya adalah tidak terdapat masalah heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Pada uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi di antara residual satu observasi terhadap residual observasi lainnya dalam suatu model regresi linier, adapun untuk dapat mendeteksi uji tersebut maka ditentukan dengan uji *Durbin-Watson* dengan ketentuannya yaitu tidak terdapat masalah autokorelasi jika $d_U < d < 4-d_U$ (Ghozali & Ratmono, 2017),

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

<i>Durbin-Watson stat</i>	1.791729
---------------------------	----------

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2022.

Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas diperoleh angka *DW* sebesar 1.791729, di mana jumlah variabel *independent* sebanyak 3, jumlah observasi (*n*) sebanyak 36 dan $\alpha(0.05)$. Nilai *Durbin Watson Lower* (d_L) sebesar 1.2953, nilai *Durbin Watson Uper* (d_U) sebesar 1.6539, nilai $4-d_U$ sebesar 2.3461, dan $4-d_L$ sebesar 2.7047. Berdasarkan hasil uji tersebut terlihat bahwa nilai *DW* memenuhi kriteria $d_U < d < 4-d_U$ maka kesimpulannya adalah tidak ada masalah autokorelasi pada model regresi.

Uji t

Uji t ini dilakukan untuk dapat mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel *independent* secara individu terhadap variabel *dependent*, dengan ketentuan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $sig > \alpha(0.05)$ maka terima H_0 , sehingga kesimpulannya yaitu tidak ada pengaruh signifikan antara variabel *independent* dengan variabel *dependent* (Ghozali & Ratmono, 2017).

Tabel 5. Hasil Uji t

Variabel	t-Statistic	Prob.
C	2.981665	0.0054
Tingkat Pendidikan	2.708292	0.0108
Upah Minimum	3.517135	0.0013
PDRB	0.693636	0.4929

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2022.

Merujuk pada tabel di atas menunjukkan hasil yaitu:

a. Tingkat Pendidikan

Didapatkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan memiliki

$t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2708392 > 2.03452$ dan nilai probabilitasnya yaitu $0.0108 < 0.05$ maka tolak H_0 , sehingga kesimpulannya secara statistik variabel tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja.

b. Upah minimum

Didapatkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa variabel upah minimum memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $3.517135 > 2.03452$ dan nilai probabilitasnya yaitu $0.0013 < 0.05$ maka tolak H_0 , sehingga kesimpulannya secara statistik variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja.

c. Produk Domestik Bruto (PDRB)

Didapatkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $0.693636 < 2.03452$ dan nilai probabilitasnya yaitu $0.4929 > 0.05$ maka terima H_0 , sehingga kesimpulannya secara statistik variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja.

Uji F

Uji ini dilakukan guna melihat apakah variabel *independent* berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel *dependent* pada suatu model regresi, dengan ketentuan jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas $> \alpha(0.05)$ maka terima H_0 , sehingga kesimpulannya yaitu variabel *independent* tidak berpengaruh terhadap variabel *dependent* (Ghozali & Ratmono, 2017).

Tabel 6. Hasil Uji F

F-statistic	30.09195
Prob(F-Statistic)	0.000000

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2022.

Nilai F_{tabel} dipatikan sebesar 2.90, sehingga hasil regresi pada tabel di atas menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $30.09195 > 2.90$ dan nilai probabilitas $0.000000 < 0.05$ sehingga tolak H_0 maka kesimpulannya adalah tingkat pendidikan, upah minimum, dan PDRB secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Uji R-Squared dan Adjusted R-Squared

Uji ini dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel *dependent*. Apabila nilai *r-squared* dan *adj.r-squared* menunjukkan hasil yang kecil maka artinya

variabel *independent* dalam menerangkan variabel *dependent* kemampuannya terbatas, namun jika nilai nya mendekati 1 maka menandakan bahwa variabel *independent* hamper memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel *dependent* (Ghozali & Ratmono, 2017).

Tabel 7. Hasil Uji R-Squared dan Adjusted R-Squared

R-squared	0.738297
Adjusted R-squared	0.713762

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2022.

Bersumber pada output regresi di atas diperoleh nilai *r-squared* sebesar 0.738297 sehingga menunjukkan bahwa variabel *dependent* dapat dijelaskan oleh variabel *independent* sebesar 73.82% dan sisanya yaitu sebesar 35.05% dijelaskan oleh variabel di luar model penelitian ini. Selain itu, diperoleh nilai *adjusted r-squared* sebesar 71.37% dan sisanya 26.63% dipengaurhi oleh variabel lainnya yang tidak digunakan pada penelitian ini.

Analisis Pengaruh Variabel Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Menurut teori Human Capital oleh Becker menyatakan bahwa keterampilan merupakan sumber utama produktivitas tenaga kerja, karena dengan tingginya keterampilan tenaga kerja tersebut maka akan dapat meningkatkan produk marjinal para pekerja tersebut. Keterampilan yang dimiliki oleh para tenaga kerja perlu melalui proses pendidikan, sehingga pendidikan merupakan investasi bagi SDM. Para tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dapat menjadi penentu para penerima kerja untuk dapat diserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia, karena tingkat pendidikan yang tinggi dapat mendorong peningkatan daya saing perusahaan serta kinerja perusahaan dapat diperbaiki. Teori Human Capital oleh Becker ini sesuai dengan keadaan nyata yang terjadi pada daerah Provinsi Jawa Barat dimana sebagaimana hasil regres data dalam penelitian ini. Pada penilitian ini memiliki yang sesuai dengan penelitian dari Monica Febrianty dan Indri Arrafi Juliannisa (2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini dapat terlihat adanya kesesuaian

dengan hipotesis dan teori-teori yang digunakan di mana meningkatnya tingkat pendidikan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan lulusan perguruan tinggi tertinggi ke dua di Indonesia dan jumlah perguruan tinggi terbanyak di Indonesia. Adapun tenaga kerja yang terserap di Provinsi Jawa Barat menurut data terlihat bahwa tenaga kerja dengan pendidikan terakhir ditamatkan pada jenjang perguruan tinggi mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hingga 2020. Tingkat pendidikan tinggi (sarjana ke atas) dapat berpeluang dalam mencari pekerjaan dan memiliki daya saing yang tinggi (BPS Provinsi Jawa Barat, 2019). Adanya kerjasama dengan perusahaan dalam mendukung program pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan penyerapan tenaga kerja dan juga dengan pihak perguruan tinggi yang menghasilkan sumberdaya yang dapat berwirausaha (Pamungkas, 2018).

Analisis Pengaruh Variabel Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Menurut teori upah efisiensi oleh Keynes menyatakan bahwa perusahaan mungkin akan membayar upah lebih dari harga pasar untuk dapat meningkatkan produktivitas pekerja tersebut sehingga kecil kemungkinan apabila tingkat upah turun karena dapat menurunkan pendapatan masyarakat sehingga berpengaruh terhadap menurunnya daya beli masyarakat akan menyebabkan menurunnya konsumsi secara keseluruhan dan harga-harga juga menurun, hal tersebut akan berpengaruh pada nilai marginal produktivitas tenaga kerja juga akan menurun dimana menunjukkan adanya penurunan jumlah tenaga kerja yang ditampung. Teori upah efisiensi oleh Keynes ini sesuai dengan keadaan nyata yang terjadi pada daerah Provinsi Jawa Barat dimana berdasarkan hasil regres data dalam penelitian ini. Penelitian ini selaras dengan penelitian dari Yunie Rahayu (2020).

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dengan hipotesis dan teori-teori yang digunakan yaitu meningkatnya upah minimum dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Adapun kondisi upah minimum yang ada di Provinsi Jawa Barat, dimana per tahun meningkat dimana formula pehitungannya sudah disesuaikan dengan peraturan

pemerintah pusat berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Kondisi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2015 hingga 2020 terus mengalami peningkatan, karena Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh pada sektor yang bersangkutan diberikan fasilitas oleh dinas daerah untuk melakukan perundingan hal ini sebagaimana yang dicantumkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pelaksanaan Upah Minimum Di Daerah Provinsi Jawa Barat pasal 8 ayat 9, adapun upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat antara lain fasilitas guna meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan kerja, memfasilitasi penempatan kerja dan pembinaan purna-kerja, kerjasama antara daerah pengirim dengan daerah penempatan yang terus diselenggarakan, dan lain sebagainya (Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, 2019)

Analisis Pengaruh Variabel PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Menurut teori Okun's Law adanya kenaikan pengangguran mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB), di mana persentase pengangguran meningkat menyebabkan penurunan 2% dalam PDB, persentase kenaikan di mana PDB berubah ketika pengangguran turun 1% adalah koefisien Okun (Asnah & Dyanasari, 2021), dimana PDRB merupakan indikator yang mempengaruhi GDP berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dimana PDRB yang meningkat dapat berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian kondisi di daerah Provinsi Jawa Barat dengan Teori Okun's Law. Hasil penelitian ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan hipotesis dan teori-teori yang digunakan yaitu meningkatnya PDRB dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Menurut David Ricardo, pertumbuhan ekonomi dapat berpeluang meningkat jika dapat memanfaatkan teknologi (Salsabila, 2021), adapun dalam Principle pada On Machinery David Ricardo menyebutkan bahwa peran modal dan tenaga kerja dapat digantikan dan menjadi berkurang karena adanya penggunaan teknologi (Fuady, 2018).

Kabupaten Garut merupakan daerah dengan PDRB terendah di antara ke 5(lima)

daerah lainnya begitupun dengan kondisi penyerapan tenaga kerjanya. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan yang menjadi penggerak perekonomian Kabupaten Garut sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tersebut relative lebih lambat daripada daerah dengan sektor unggulan industri dan efek multiplier sektor pertanian lebih rendah daripada sektor industri. Adapun permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Garut yaitu angkatan kerja yang tidak optimal terserap pada sektor-sektor produksi karena lapangan pekerjaan yang sedikit juga rendahnya tingkat kompetensi para angkatan kerja (BAPPEDA Kabupaten Garut, 2020). Kabupaten Bekasi merupakan daerah dengan PDRB tertinggi, dimana Kabupaten Bekasi merupakan barometer industri pengolahan terhadap perekonomian nasional, hal tersebut berdampak pada Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan tujuan untuk mencari pekerjaan menyebabkan tingginya urbanisasi di Kabupaten Bekasi, sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja (Suchayono & Puspitasari, 2020)

SIMPULAN

1. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu dapat disimpulkan semakin meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat maka dapat kualitas sumber daya manusia akan meningkat sehingga dapat bersaing di dunia kerja. Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang memiliki lulusan perguruan tinggi terbanyak di Indonesia hal ini juga sejalan dengan kondisi pekerja lulusan sarjana yang terus meningkat.
2. Upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga. Oleh karena itu dapat disimpulkan upah minimum yang meningkat dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Perusahaan mungkin dapat membayar upah lebih dari harga pasar guna meningkatkan produktivitas pekerja itu sendiri, sehingga kemungkinan kecil jika tingkat upah diturunkan karena dengan menurunnya upah akan berdampak bagi penurunan jumlah tenaga kerja yang dapat ditampung. UMP Jawa Barat selalu meningkat per tahunnya dan penyerapan tenaga kerjanya pun juga terus meningkat.
3. PDRB tidak berpengaruh terhadap variabel penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu

dapat disimpulkan peningkatan PDRB tidak mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Adapun hal tersebut dapat terjadi apabila pertumbuhan ekonomi tidak bersamaan dengan peningkatan lapangan kerja, selain itu juga melambatnya pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada menurunnya penyerapan angkatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2019, Oktober 4). *Jabar*. Diambil kembali dari jabar.antarnews.com: <https://www.google.com/amp/s/jabar.antarnews.com/amp/berita/113918/disnakertrans-peluang-pekerjaan-di-garut-mulai-terbuka>
- Ali, G., Kolengan, R. A., & Siwu, H. F. (2020). Pengaruh PDRB Dan Invesasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efiseinsi*, 1-11; Volume 20 Nomor 01.
- Angga, & Fitriah. (2020). Pengaruh Upah Minimum Provinsi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 91-99; Volume 5 Nomor 2.
- Anton, P., & Huda, M. (2019). Analisis Peranan Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kebumen. *Jurnal Fokus Bisnis*, 26-35; Volume 18 Nomor 01.
- Ariyanto, A. (2018, July 02). *INA-Rxiv*. Diambil kembali dari osf.io: <https://osf.io/preprints/inarxiv/5ydqg/>
- Asnah, & Dyanasari. (2021). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Sleman: CV Budi Utama.
- BAPPEDA Garut. (2020). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019*. Garut: Bappeda Kabupaten Garut.
- BAPPEDA Kabupaten Bogor. (2020). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2019*. Kabupaten Bogor: BAPPEDA Kabupaten Bogor.
- BAPPEDA Kabupaten Garut. (2020). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019*. Garut: BAPPEDA Kabupaten Garut.
- BPS Kota Bandung. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung Menurut Lapangan Usaha 2014 - 2018*. Bandung: BPS Kota Bandung.
- BPS Provinsi Jawa Barat. (2019). *Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Barat Agustus 2019*. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat.
- Buana, G. (2018, Januari 29). *Nasional*. Diambil kembali dari www.medcom.id: <https://www.medcom.id/nasional/metro/PNgJqeoK-pengusaha-garmen-mulai-meninggalkan-bekasi>
- Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor . (2019). *Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023*. 2019: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor .
- DISNAKER Kabupaten Bandung. (2018). *Rencana Kerja Tahun 2019*. Bandung: DISNAKER Kabupaten Bandung.
- Disnakertrans Provinsi Jawa Barat. (2019). *Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023*. Bandung: Disnakertrans Provinsi Jawa Barat.
- Febrianty, M., & Juliannisa, I. A. (2021). Penyerapan Tenaga Kerja Di Wilayah DKI Jakarta Pada Tahun 1990-2019. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 253-267; Vol. 5 No.3.
- Fuady, A. H. (2018). Teknologi Digital Dan Ketimpangan Ekonomi Di Indonesia. *LIPI*, 75-88; Vol. 44 No.1.
- Ganie, D. (2017). Analisis Pengaruh Upah, Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk Dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. *Jurnal EKSEKUTIF*, 332 - 354; Volume 14.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariate dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10 (Edisi 2)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2015). *Dasardasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handriansyah, H. (2018, Desember 5). *Bandung Raya*. Diambil kembali dari www.pikiran-rakyat.com: <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung->

- raya/pr-01304161/diprediksi-ada-130000-pengangguran-baru-di-kabupaten-bandung-434068
- Ibrahim, Y. F. (2020). *Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Barat 2020*. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Iksan, S. A., Arifin, Z., & WahyudiSuliswanto, M. S. (2020). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi, Dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenga Kerja Di Indonesia . *Jurnal Ilmu Ekonomi* , 42-55; Volume 4, Nomor 1.
- Komisi IX DPR RI. (2020). *Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI Ke Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Pada Reses Masa Persidangan IV Tahun 2019-2020*. Jakarta: Komisi IX DPR RI.
- Lokanathan, V. (2018). *A History of Economic Thought, 10th Edition*. New Delhi: S Chand And Company Limited.
- Lumanaw, T. P., Rumokoy, D. A., & Tampanguma, M. Y. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dari Tenaga Kerja Untuk Memperoleh Upah Minimum Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Lex Privatum*, 211-220; Volume IX Nomor 6.
- Marliani, G. (2018). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Banjarbaru (Studi Usaha Percetakan). *Jurnal Studi Ekonomi*, 48-54; Volume 9 Nomor 1.
- Meilasari, D. (2020). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB, Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Pulau Jawa tahun 2010-2016. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 169-190; Volume 1 Nomor 2.
- Mukherjee, S. (2002). *Economics for C.A. Proffesional Education Course 1*. New Delhi: New Age International (P) Ltd.
- Muslihatinningsih, F., Walid, M., & Subagiarta, I. W. (2020). Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur . *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 1-6; Volume VII (I).
- Pamungkas, W. W. (2018, April 4). *Kabar Jabar*. Diambil kembali dari bandung.bisnis.com: <https://bandung.bisnis.com/read/20180404/549/1111483/ineu-pt-di-jabar-bantu-pemprov-ciptakan-lulusan-siap-kerja>
- Pratiwi, I. M., Marseto, & Sishadiyati. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Bangkalan . *Jurnal Syntax Transformation*, 788-796; Volume 2 Nomor 6.
- Purwanti, D., Wijaya, A. R., Meigawati, D., & Kusuma, H. A. (2021). Formulasi PERDA Ketenagakerjaan Kota Sukabumi Dalam Sudut Pandang Akademik. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, 89-99; Volume 5 Nomor 1.
- Rahayu, Y. (2020). Pengaruh Upah Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019.